



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SAMBUTAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BAPPENAS
Pada Acara Diskusi
"MENCARI PEMIMPIN YANG DAPAT DITELADANI"
Jakarta, 31 Juli 2006

KEPEMIMPINAN YANG BAIK
DALAM ERA DEMOKRASI

Saudara-saudara sekalian
peserta diskusi yang berbahagia,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua,

Pertama-tama perkenankan saya secara tulus mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas ridha Nya sehingga kita dapat hadir bersama di ruangan ini untuk mengikuti acara Pada Diskusi "MENCARI PEMIMPIN YANG DAPAT DITELADANI".

Merupakan suatu kehormatan bagi saya menjadi *keynote speaker* pada diskusi yang menurut saya memilih tema yang cukup menantang keingintahuan masyarakat luas, yakni mengenai sosok pimpinan, yang dalam konteks sosial politik Indonesia seringkali harus mampu membawakan dirinya sebagai panutan rakyat yang dipimpinnya.

Mencari sosok pimpinan yang dapat diteladani merupakan pekerjaan yang “susah-susah gampang,” dan seringkali mengandung resiko, mengingat definisi pemimpin mengandung berbagai makna yang terkait dengan pengetahuan, etika, moralitas, keahlian, kredibilitas, serta kemampuan melakukan komunikasi, keluasan visi dan persyaratan-persyaratan lain yang dianggap penting perlu dipenuhi oleh seorang pemimpin.

Namun demikian, pada kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan beberapa pokok pikiran tentang konsep pemimpin dan kepemimpinan yang baik dalam demokrasi. Hal ini dengan mengingat demokrasi adalah sebuah sistem politik yang masih baru saja kita terapkan dan sedang mencari bentuknya yang di satu pihak diharapkan sesuai dengan perkembangan masyarakat tapi di lain pihak diharapkan sejalan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara modern.

Pada suatu sistem politik demokrasi, tugas menjadi pemimpin adalah merupakan tugas menunaikan amanat publik. Pada setiap tingkatan kepemimpinan publik, apakah pemimpin nasional ataupun pemimpin pada tingkat lokal, amanat publik tidak diberikan secara gratis, melainkan harus dibayar dengan pertanggung jawaban publik mengenai tugas yang dibebankan kepadanya.

Oleh sebab itu, dalam sistem pemerintahan kita, walaupun tidak semua lembaga negara dan lembaga publik pemimpinnya langsung dipilih oleh rakyat, pemilihan mereka harus dilakukan melalui proses yang langsung melibatkan kelembagaan yang dipilih langsung oleh rakyat. Misalnya, DPR melakukan *fit and proper test* terhadap pemimpin yang akan ditugaskan memimpin lembaga yang sangat strategis serta menyangkut kepentingan rakyat secara keseluruhan. Demikian pula

Presiden harus dapat mempertanggung jawabkan kinerja Kabinet yang dipilihnya kepada rakyat yang memilih Presiden, dan seterusnya. Makin kokoh mekanisme saling mempertanggung jawabkan kinerja antar lembaga-lembaga penyelenggaran negara terhadap rakyat, maka demokrasi yang ada dapat dianggap berjalan makin baik atau lebih terkonsolidasi.

Demokrasi modern dipilih sebagai sistem politik umumnya karena sistem ini menyediakan mekanisme pertanggungjawaban terlengkap dibandingkan dengan semua sistem politik yang pernah ada dan dijalankan oleh sebuah negara. Sistem demokrasi memiliki dasar filosofi, seperti halnya rakyat yang dipimpinnya, pemimpin adalah manusia biasa, bukan *superman*. Pemimpin dipilih karena bakat-bakat dan kredibilitas yang dimilikinya diperlukan oleh masyarakat untuk menerjemahkan sebuah visi bersama menjadi misi bersama yang bisa dilaksanakan secara sebaik-baiknya untuk kebaikan seluruh masyarakat pemilihnya.

Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati,

Pemimpin dalam demokrasi dipilih bukan karena dia SUCI dan SAKTI MANDRAGUNA, dan seolah-olah tanpa diawasi bisa jalan sendiri dengan sempurna, seolah-olah tidak akan tergoda MELAKUKAN KORUPSI dan kepribadiannya dapat dianggap telah memenuhi semua syarat-syarat yang ada di dalam kitab-kitab kuno zaman kerajaan dahulu kala.

Sebaliknya, Pemimpin dalam sebuah demokrasi tidak lebih dari seorang yang sering disebut sebagai PRIMUS INTER PARES (Yang Pertama dari Yang SEJAJAR). Dia bisa anak petani, anak nelayan, anak Pak Haji, bisa juga dari keluarga priyai ataupun keturunan raja-raja. Latar

belakang keluarga tidak ada kaitannya dengan kelayakan seseorang menjadi pemimpin publik dalam sebuah demokrasi.

Tidak seperti dalam sebuah Monarkhi, demokrasi tidak akan menerima begitu saja setiap kebijakan dan tindakan pemimpin, tanpa memahami dan mengerti tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dari kebijakan yang dibuat untuk kepentingan masyarakat. Demokrasi tidak mengenal istilah POKOKNYA PERCAYALAH pada "SAYA". Sebaliknya kita tahu, dalam sebuah sistem kerajaan zaman dulu, misalnya, karena kekuasaan seorang pemimpin atau raja diberikan oleh "YANG DI ATAS," maka rakyat dilarang mempertanyakan kebijakan dan tindakan raja atau pemimpin, karena TAKUT KUALAT. Ini tak perlu diteruskan dalam era demokrasi.

Ringkasnya, syarat menjadi pemimpin pada era demokrasi ini hanya satu, seorang calon pemimpin dipilih oleh rakyat dalam sebuah mekanisme pemilihan yang terbuka, adil, dan jujur. Konstitusi dan perundang-undangan yang menjadi dasar pemilihannya pun diharapkan merupakan konsensus bersama oleh masyarakat seluas-luasnya.

Satu hal mesti diingatkan, karena pemimpin bertugas melaksanakan tugas-tugas publik, maka sebaiknya dapat diatur sejelas-jelasnya antara kehidupan publik sang pemimpin dengan kehidupan pribadinya, keluarga dan kelompoknya. Keduanya tidak dapat dicampur-adukkan, karena akan terjadi apa yang sering disebut sebagai benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Dalam sebuah negara demokrasi yang sudah maju, maka peraturan-peraturan yang menyangkut pemisahan tugas-tugas publik dan kepentingan pribadi ini dibuat sedemikian jelas dan tegas

implementasinya, sehingga kepentingan umum tetap terlindungi, tidak dimanipulasi untuk kepentingan-kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok dari Pemimpin yang bersangkutan. Karena dalam konsep demokrasi, kepentingan masyarakat (umum) adalah hukum tertinggi (*bonum commune suprema lex*).

Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati,

Apabila memang ingin dikategorikan aspek-aspek yang perlu diteladani dari seorang pemimpin dalam sebuah demokrasi, maka menurut hemat kami, ada tiga segi yang perlu dikemukakan dari seorang pemimpin.

PERTAMA, keteladanan dalam caranya memposisikan konstitusi, hukum, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah kepemimpinannya, apakah pada tingkat nasional ataupun daerah. Pemimpin yang patut diteladani adalah pemimpin yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan yang sudah ditetapkan melalui proses hukum dan proses politik dan yang demokratis. KONSTITUSI DAN HUKUM di atas segala-galanya.

KEDUA, keteladanan dalam sikapnya dalam menghadapi permasalahan maupun tindakannya dalam menghadapi krisis tertentu. Pemimpin yang perlu diteladani adalah pemimpin yang selalu bersikap teguh memegang keyakinan bahwa prosedur dan institusi demokrasi adalah satu-satunya cara menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan kolektif, dengan demikian menutup kemungkinan masuknya kekuatan-kekuatan anti-demokrasi ataupun kekuatan-kekuatan yang menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendaknya. PROSEDUR DAN INSTITUSI adalah cara menyelesaikan masalah, bukan pemaksaan kehendak dan kekerasan.

KETIGA, keteladanan dalam perilakunya yang selalu menghindari cara-cara non-demokratis ataupun melawan hukum dalam melaksanakan kebijakan tertentu ataupun dalam menggunakan sumber-sumber daya pembangunan dalam mencapai tujuan tertentu yang sudah digariskan. Pendeknya, pemimpin yang baik TIDAK MENGHALALKAN SEGALA CARA untuk mencapai tujuan tertentu.

Apabila seorang memiliki kualitas-kualitas seperti yang kami sebutkan di atas, maka silahkan saja mengajukan dirinya menjadi pemimpin. Karena dalam demokrasi, orang yang memiliki konsep dan kualitas kepribadian yang memenuhi syarat untuk melayani kepentingan publik, diharapkan berani mengajukan dirinya ke depan dan bersaing dengan kandidat-kandidat pemimpin yang lain, sesuai dengan prosedur, peraturan dan mekanisme yang berlaku. Semakin banyak calon-calon pemimpin yang berkualitas, maka kepentingan umumlah yang paling diuntungkan, karena dalam Pemilihan Umum yang jujur, calon-calon yang tidak bermutu akan tersisih dengan sendirinya.

Demikianlah, semoga Allah Yang Maha Kuasa memberi rahmat dan karunia-Nya bagi semua itikad baik kita bagi bangsa dan tanah air tercinta.

Terima kasih

Wassalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 31 Juli 2006

Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas

H. Paskah Suzetta